

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN TESIS	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
LAMPIRAN	ix
INTISARI.....	x
ABSTRACT	xi
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan masalah dan Pertanyaan Penelitian	7
1.3 Tujuan penelitian	7
1.4 Manfaat penelitian	7
1.5 Sistematika Penulisan	7
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 9
2.1 Penelitian Terdahulu	9
2.2 Formulasi Kebijakan Publik	14
2.3 Keterlibatan Pemangku Kepentingan dalam Perumusan Kebijakan.....	19
2.4 Metode Analisis Pemangku kepentingan.....	34
2.5 Kerangka Berpikir.....	36
 BAB III METODE PENELITIAN.....	 39
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	39
3.2 Fokus Penelitian.....	40
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	41
3.4 Teknik pengumpulan data.....	45
3.5 Teknik Pemeriksaan Keabsahan data.....	51
3.6 Metode Analisis Data.....	52
 BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN.....	 54
4.1 Proses dan Tahapan Perumusan Kebijakan Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Aceh.....	54
4.1.1 Lobi Kebijakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Aceh	54
4.1.2 Penyusunan Naskah Akademik dan Draf Rancangan Kebijakan Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.....	59

4.1.3	Pengembangan Alternatif Kebijakan Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kalangan Tenaga Ahli DPRA dan Tenaga Ahli DPPP	61
4.2	Pemangku Kepentingan dalam Perumusan Kebijakan Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Aceh	64
4.2.1	Keterlibatan Pemangku Kepentingan dalam FGD penyusunan Naskah Akademik	65
4.2.2	Keterlibatan Pemangku Kepentingan dalam RDPU	70
4.3	Model dan Bentuk Interaksi Antar Pemangku Kepentingan	73
BAB V	HASIL DAN PEMBAHASAN	75
5.1	Hasil Penelitian	75
5.1.1	Legitimasi, Kekuatan dan Urgensi: Kemampuan Pemangku Kepentingan Dalam Mempengaruhi Perumusan Kebijakan Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	75
5.1.2	Tipe dan Tingkat Prioritas Pemangku Kepentingan dalam Perumusan Kebijakan Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	89
5.2	Pembahasan Penelitian	92
5.2.1	Pengaruh Pemangku Kepentingan Terhadap Perumusan Kebijakan Anti Kekerasan Pada Perempuan dan Anak di Aceh	93
5.2.2	Lingkup Keterlibatan Pemangku Kepentingan dalam Perumusan Kebijakan Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	102
5.2.3	Tantangan Pelibatan Pemangku Kepentingan dalam Perumusan Kebijakan Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	104
BAB VI	PENUTUP	109
6.1	Kesimpulan	109
6.2	Rekomendasi	109
	DAFTAR PUSTAKA	112
	DAFTAR ISTILAH	118